



Pertahanan Indonesia dan Pandangan Mengenai Ancaman serta Ambisi pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia

Indonesian Defense and The Views on Threats and Ambitions in Every Era of Indonesian Regime

Posma Sariguna Johnson Kennedy

posmahutasoit@gmail.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Abstract

In looking at the main national strategies that have been implemented by the nation's leaders and their consequences for the defense viewpoint, a historical review is needed to look at the experiences that may be useful in the future. The purpose of this paper is to see the difference of perspective in the implementation of state defense in every era or era of government regime. This study is a preliminary study to look at the economy and defense management. The research method used is literature review. Indonesia has experienced three eras of leadership, namely the old order (orde lama), the new order (orde baru), and the reform order (orde reformasi). Each order has its own view of threats and ambitions, especially in the international world. When Indonesia was newly independent, the old order government emphasized the strength of military defense in the face of ongoing aggressions and insurgencies. This hard power politics turned into soft power politics in the new order era and reform. The consequence is that the ability of defense forces is not the main thing but economic development is a priority. In the reform era, the Indonesian National Army was again mandated to keep Indonesia's defense and sovereignty from external threats. With the ability of resources owned by Indonesia, especially natural resources, population, and geographical location is very strategic, making Indonesia ambitious to become one of the economic strengths in the region. With the basic capital owned by Indonesia, the ambition is actually fair and capable to achieve.

Keywords: *Defense, Threat, Ambitions, Regime*

1. Pendahuluan

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008).

Sistem Pertahanan Nasional bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

Dalam melihat strategi utama nasional yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa serta konsekuensinya terhadap cara pandang penyelenggaraan pertahanan, perlu dilakukan tinjauan sejarah untuk melihat pengalaman yang dapat bermanfaat di masa depan. Tujuan tulisan ini adalah

untuk melihat perbedaan cara pandang dalam penyelenggaraan pertahanan negara pada setiap masa atau era rezim pemerintahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah kajian pustaka dengan meninjau data-data sekunder yang berupa buku-buku, paper atau dokumen-dokumen lainnya.

Kajian ini merupakan penelitian awal untuk melihat ekonomi dan manajemen pertahanan yang akan dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya setelah ini. Dengan demikian dapat dijadikan dasar untuk melihat motivasi Indonesia dalam menentukan anggaran pertahanannya, apakah karena rutinitas belaka, atau karena adanya ancaman, atau untuk menjaga kekayaan alam dan perekonomian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kennedy, 2016)

2. Sejarah Pertahanan Nasional

Pada masa pemerintahan Orde Lama, konsepsi pertahanan keamanan ditetapkan untuk kepentingan menghadapi serangan Belanda dan sekutunya, baik dalam Agresi Militer Pertama maupun Agresi Militer Kedua. Selanjutnya konsepsi tersebut diberdayakan untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, menghadapi Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Jaya (Trikora) ke dalam NKRI, konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora), serta upaya menyelamatkan negara dari kehancuran di segala bidang kehidupan rakyat. Secara umum konsep pertahanan ini digunakan untuk mengamankan kemerdekaan dan keutuhan negara.

Pada saat itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibangun dengan tujuan menghadapi segala ancaman yang bersifat militer, baik dari negara lain maupun pemberontakan dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, kepemimpinan internasional Soekarno membawa Indonesia aktif di percaturan politik dunia dengan membentuk organisasi Non-Blok yang bersifat netral di antara pertikaian ideologi militer antara Pakta Warsawa dan NATO dalam Perang Dingin.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan kebijakan pada masa pra-konfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Soekarno semakin bergeser dengan mempromosikan kebijakan luar negeri yang lebih condong kepada Uni Soviet dan China. Hal ini seiring dengan meningkatnya persaingan antara legitimasi Soekarno, militer, dan PKI di dalam negeri. Karenanya, upaya-upaya peningkatan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, dan berkaitan dengan modernisasi perlengkapan militer serta kemampuan personil.

Semasa kebijakan Orde Lama berbagai operasi militer dikerahkan dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa tindakan militer dilakukan lebih kepada *hard politics*, dibandingkan dengan *soft politics* melalui resolusi damai atau diplomasi. Pada awalnya *soft politics* memang dilakukan pada masa-masa awal kemerdekaan yang ditunjukkan dengan adanya berbagai perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Akan tetapi kekuatan militer tetap selalu disiagakan untuk menjaga kedaulatan negara, mengingat Belanda juga menggunakan *hard politics* untuk menekan Indonesia melalui Agresi Militer Belanda II.

Pemikiran atau ideologi Soekarno sangat mencurigai neo-kolonialisme, yang dikatakannya sebagai bentuk penjajahan baru melalui kekuatan kapitalisme dan imperialisme. Maka secara logis pertahanan negara dibentuk dengan pembangunan kekuatan postur militer yang kuat. Kebutuhan atas kekuatan militer yang besar pada saat itu untuk mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan Indonesia melahirkan konsep mengenai pelibatan rakyat dalam perang, yang dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Bakrie, 2007).

Setelah jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1965, Indonesia dihadapkan pada kondisi sosial politik yang tidak menentu dengan perekonomian yang buruk. Presiden Soeharto mendapatkan legitimasi untuk memimpin perubahan nasional mengarahkan tujuannya pada pembangunan negara. Saat era Orde Baru ini, militer menjadi jauh lebih aktif terlibat dalam kehidupan politik dengan peran dan kesempatan yang sangat besar untuk menjalankan berbagai urusan sipil yang dilegitimasi melalui Dwi Fungsi ABRI. Militer memiliki hak-hak istimewa yang besar dalam politik yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi status *quo*. Militer berfungsi lebih pada menciptakan ketertiban dan berkonsentrasi pada ancaman internal dari pada menghadapi ancaman eksternal.

Pemerintahan Orde Baru lebih mempromosikan konsep Ketahanan Nasional yang menekankan pada dimensi internal dan digunakan untuk menciptakan stabilitas negara. Sedangkan untuk kebijakan politik luar negerinya, pemerintah menerapkan *soft politics* dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan di Asia Tenggara. Tampak pemerintah Orde Baru lebih bersifat “mengamankan” kepentingan internal melalui kebijakan luar negeri yang mendukung diplomasi sebagai resolusi damai. Dengan kebijakan politik ini, maka kekuatan militer dibangun dengan perspektif tersebut. Walaupun fakta menunjukkan bahwa pada tahun 1976, pemerintahan Orde Baru berhasil membawa Timor-Timur menjadi bagian dari Indonesia, tetapi secara keseluruhan, konsentrasi pertahanan pada masa Orde Baru tetap bersifat internal (Bakrie, 2007).

Pada masa transisi demokrasi, sejak berakhirnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah melalui proses era empat kepemimpinan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014. Terdapat perubahan yang mendasar, reformasi TNI dilakukan yang lebih ditujukan untuk menghadapi ancaman eksternal sebagai tugas pertahanan negara. Secara umum misi TNI bersifat eksternal, tetapi posturnya belum dibangun berdasarkan perspektif internasional. Hal ini terkait dengan lebih mengedepkannya supremasi sipil dalam memandang posisi Indonesia di percaturan politik internasional.

Dalam periode reformasi ini, kebijakan luar negeri Indonesia terlihat bersifat idealis, atau menekankan diplomasi damai dalam perselisihan antar negara. Namun dalam prakteknya harus disadari bahwa, ketika diplomasi tidak dibangun atau ditopang oleh kondisi ekonomi atau postur militer yang kuat, maka tingkat efektifitasnya pun juga rendah. Kebijakan yang diberikan pemerintah hanya menciptakan stabilitas nasional yang kuat, dan secara ekonomi sangat kondusif bagi investasi asing. Penerapan kebijakan ini dapat dikatakan asosiatif dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, sehingga pembangunan terhadap postur TNI masih mengikuti kebijakan Orde Baru. Akan tetapi sebenarnya pada era reformasi ini, undang-undang mengamanatkan secara khusus bahwa TNI memiliki tugas pertahanan yang bersifat eksternal (Bakrie, 2007).

3. Pandangan Terhadap Ancaman

Setelah era Orde Lama, pemerintah melaksanakan pembangunan dengan menekankan pada faktor ekonomi. Namun demikian dalam pergaulan internasional, situasi lingkungan tidak selalu bergerak dalam suasana harmonis. Terdapat berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan sehingga dapat menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik. Hal ini tentunya menimbulkan ancaman bagi negara yang kepentingannya tidak bisa diterima oleh negara lain.

Ancaman, konflik atau bahkan perang merupakan fenomena yang usianya setua umur umat manusia. TB Simatupang (1985) menulis bahwa pengetahuan tentang perang adalah masalah sangat penting bagi negara, yang dapat menentukan hidup matinya suatu negara, apakah merupakan jalan ke arah keamanan atau ke arah keruntuhan. Karena pentingnya perang, perang itu melekat pada eksistensi negara-bangsa, sehingga setiap negara menyadari keberadaannya dan dipandang berkepentingan untuk memikirkan kemungkinan perang. Ini berarti setiap negara pada hakekatnya akan selalu memikirkan suatu kekuatan/kondisi dalam rangka mendukung perang atau mengantisipasi perang. TB Simatupang juga mengingatkan suasana perang bukan berarti tidak ada damai, suasana damai bukan berarti tidak ada perang/konflik.

Sejarah perang memberi fakta bagaimana kekuatan militer suatu negara dengan dukungan berbagai fasilitas/peralatan militer memberi keunggulan dan keuntungan walaupun itu jauh lebih merugikan jika dibandingkan tidak dalam keadaan perang. Perang zaman sekarang bersifat total karena seluruh wilayah bisa menjadi medan perang. Sebagai akibatnya seluruh rakyat menjadi terlibat dan mengalami akibat-akibat perang. Perang masih terlalu sering dipakai untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar aktor (negara-bangsa). Walaupun demikian sejarah menunjukkan bahwa kesadaran dan keinginan aktor negara untuk dapat menyelesaikan konflik di antara mereka dengan jalan damai selalu diupayakan (Sulfa, 2008).

Perlu berkaca dari ambisi Napoleon Bonaparte yang ingin menjadi penguasa Eropa pada masanya. Ia membawa perubahan besar di Eropa di segala segi, termasuk dalam dunia militer. Sebelum era Napoleon, negara-negara di Eropa biasanya memiliki sedikit tentara, dan itupun banyak

diisi oleh tentara bayaran. Sejak era Napoleon setiap negara mulai melipatgandakan jumlah pasukannya untuk selalu waspada dalam mengimbangi musuh-musuhnya di medan perang dengan strategi pertahanan yang lebih berinovasi (Syamtidar, 2011).

Sejak pelaut-pelaut Eropa mengarungi samudera pada akhir abad ke-15 untuk menaklukkan dunia, histografi dan politik internasional sudah terbiasa dengan suatu pola tertentu, yaitu kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi yang diterjemahkan sebagai alat mempengaruhi dan menaklukkan bangsa-bangsa lain, dalam mendominasi dan membentuk emporium skala global. Pola yang sama berlaku pada abad ke-20, setelah pecahnya dua perang dunia Amerika Serikat dan Uni Soviet menggantikan kedudukan negara-negara besar Eropa di panggung global. Perang Dingin dan masa dominasi AS setelah 1998/1990 juga mengikuti pola ini (Purwanto, 2011).

Jika melihat masa ke depan, Cooper (2004) menjelaskan bahwa dunia modern kini menghadapi peningkatan ancaman keamanan internasional akibat ‘unjuk’ kekuatan militer suatu negara yang dipersiapkan untuk melakukan agresi terhadap negara lain. Kondisi keamanan pada masa ini terjadi lebih dikarenakan munculnya “perimbangan kekuatan” (*balance of power*) antar negara sebagai konsekuensi dari pembangunan kekuatan militer masing-masing. Pemikiran yang berkembang masih didominasi oleh konsep hubungan internasional dalam aliran realis, yang menyatakan bahwa dalam hubungan negara tidak ada musuh atau kawan permanen, yang ada hanyalah kepentingan kepentingan politis (Bakrie, 2009)

Perkembangan militer sampai saat ini menunjukkan bahwa, strategi damai dan diplomasi dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lain di dunia untuk tercapainya perdamaian masih diragukan. Dengan demikian terdapat keyakinan bahwa percaya terhadap perdamaian harus mendasarkan diri pada kemampuan sendiri, karena konsep inilah yang paling dapat dipercaya. Perdamaian bisa timbul melalui kekuatan militer, dan kemungkinan agresi lawan hanya bisa dicegah jika suatu negara memiliki keunggulan kekuatan. Seperti sebuah adagium “*Si Vis Pacem Para Bellum*”, siapa ingin damai, bersiap-siaplah sewaktu-waktu untuk perang. Sehubungan dengan hal ini, mungkin relevan dengan kondisi, bahwa kebanyakan negara akan memilih pemilikan senjata terlalu banyak daripada pemilikan senjata terlalu sedikit. Walaupun pemilikan senjata ini sebenarnya tidak dapat juga memecahkan *security dilemma*, perlombaan dan konflik bersenjata antar negara (Sulfa, 2008).

Untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, sudah sangat sewajarnya jika Indonesia mengembangkan kekuatan pertahanannya. Kesiapsiagaan terhadap variasi ancaman di masa depan yang mungkin terjadi karena perebutan sumber-sumber daya ekonomi di dunia, akan menyiapkan bangsa menghadapi segala tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan nasionalnya.

4. Pandangan Terhadap Ambisi

Terdapat perbedaan pandangan dari para pemimpin dalam memperlihatkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional bahkan dunia pada zamannya. Soekarno menempatkan legitimasi pemerintahan pada ide revolusi, sedangkan era Soeharto menempatkan legitimasi pada pembangunan ekonomi. Pada era reformasi kebijakannya adalah meneruskan pembangunan ekonomi yang ditunjang oleh stabilitas politik sebagai salah satu titik penting dalam konteks pengembangan politik luar negeri Indonesia (Suryadinata, 2003).

Pada masa Orde Lama, kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh semangat patriotisme pasca kolonial dan situasi awal Perang Dingin di tingkat internasional. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia memfokuskan pada upaya pencarian pengakuan dari negara lain yang diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Sebagai negara yang baru berdiri dengan kondisi ekonomi relatif masih lemah, Indonesia tetap memiliki semangat patriotisme dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya untuk membangun citra Indonesia. Kebijakan luar negeri Orde Lama cenderung bersifat *hard profile* dengan pendekatan yang keras. Soekarno secara tegas melakukan penentangan terhadap bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Barat dan berhasil menggalang persatuan di antara negara terjajah dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dengan memimpin gerakan Non Blok.

Pada masa Orde Baru pendekatan *low profile* dilakukan oleh Soeharto, yaitu dengan pendekatan yang lebih lunak dan terkesan bersahabat dalam menjalin hubungan luar negeri. Contohnya adalah pendekatannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan ring terdekat secara geo politik dan geo ekonomi, serta dianggap sebagai potensi utama peluang dan ancaman bagi Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan usulan tentang pembangunan sebuah hubungan persahabatan diantara negara-negara di Asia Tenggara dalam sebuah forum kerjasama bernama ASEAN.

Kedua era tersebut, pada dasarnya memiliki pola yang relatif sama, yaitu berpusat pada Presiden. Pemikiran Soekarno yang anti kolonialisme terimplementasi dalam kebijakan luar negerinya yang kemudian banyak berseberangan dengan Barat. Soeharto yang lebih pro terhadap pembangunan ekonomi memandang negara-negara Barat adalah sebuah peluang untuk kerjasama ekonomi. Pada orde reformasi terdapat perubahan fundamental dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu dari *executive heavy* kepada *public heavy*, yang tidak lagi didominasi oleh Presiden namun terbuka kesempatan kepada publik untuk ikut serta memberikan pendapat, baik melalui parlemen maupun lembaga swadaya masyarakat secara lebih demokratis. Pada era ini Indonesia terlihat ingin berteman kepada seluruh negara dengan politik luar negeri bebas aktif dan berperan besar di kancah internasional.

Yudhoyono dalam MP3EI menuliskan era reformasi ditandai dengan berbagai krisis yang mengguncang dunia, dimulai dari krisis moneter yang melanda negara-negara berkembang, sampai dengan krisis global yang melanda negara-negara maju. Akibat krisis tersebut pusat gravitasi ekonomi global berpindah ke kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dimana Indonesia berada tepat di pusat pusarannya. Ketika tren jangka panjang pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Asia menunjukkan peningkatan. Selain letaknya yang sangat strategis Indonesia juga memiliki hampir semua prasyarat untuk mampu menjadikan dirinya menjadi kekuatan besar perekonomian dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar dan produktif, serta akses yang strategis ke jaringan mobilitas global, Indonesia mempunyai asset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam tata pergaulan antar bangsa dan layak serta berkemampuan untuk menjadi *big player* dalam perekonomian global (MP3EI, 2011).

Terlihat di setiap era kepemimpinan Indonesia selalu memiliki keinginan untuk menjadi yang terbaik di kawasan internasional. Pengutamaan pada perekonomian sudah merupakan arah yang benar dalam mengembangkan kekuatan nasional. Karena negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar tentunya mampu mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi kekuatan perekonomian ini perlu diiringi dengan kekuatan pertahanan untuk melindungi segala kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat.

5. Kesimpulan

Indonesia telah mengalami tiga era kepemimpinan, yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Setiap orde memiliki pandangannya tersendiri terhadap ancaman dan ambisi, khususnya di dunia internasional.

Ketika Indonesia baru merdeka, pemerintahan orde lama menekankan kuatnya pertahanan militer dalam menghadapi agresi-agresi dan pemberontakan-pemberontakan yang masih berlangsung. Politik *hard power* ini berubah menjadi politik *soft power* pada era orde baru dan reformasi. Konsekuensi yang terjadi adalah kemampuan kekuatan pertahanan bukan menjadi hal yang utama tetapi pembangunan ekonomilah yang menjadi prioritas. Pada era reformasi Tentara Nasional Indonesia kembali diamanatkan menjaga pertahanan dan kedaulatan Indonesia dari ancaman eksternal.

Dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki Indonesia khususnya sumber daya alam, jumlah penduduk, dan letak geografis yang sangat strategis, membuat Indonesia berambisi menjadi salah satu kekuatan perekonomian di kawasan regional. Dengan modal dasar yang dimiliki Indonesia, ambisi tersebut sebenarnya adalah wajar dan mampu untuk dicapai. Akan tetapi akan jauh panggang dari api jika hanya berharap pada modal dasar tersebut. Perekonomian hanya bertumpu pada sumber

daya alam dan tidak pada peningkatan kualitas, teknologi, inovasi dan kreatifitas. Selain itu lengah terhadap ancaman-ancaman dari pihak atau negara lain yang mengganggu kedaulatan dapat menjadi kelemahan yang utama.

REFERENSI

- Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Bakrie, Connie Rahakundini. 2009. *Defending Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cooper, Robert. (2004). *The Breaking of Nation : Order and Chaos in 21st Century*. London : Atlantic Book.
- Departemen Pertahanan Indonesia. (2008) *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2016). Model-Model Ekonomi Permintaan Anggaran Pertahanan, Buletin Ekonomi FEUKI, ISSN-14103842 Vol.20 No.1 Mei 2016.
- Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.
- Purwanto, Wawan H. (2011). *TNI dan Dunia Baru Sistem Pertahanan*. Jakarta : CMB Press.
- Simatupang, T.B. (1985). *Perang Pelopor dalam Damai*. Jakarta : PT. Bunda Karya.
- Sulfa. (2008). “Negara dan Pembangunan Kekuatan Militer dalam Konstelasi Politik Internasional”. *SELAMI IPS* Edisi Nomor 23 Volume I Tahun XIII April 2008.
- Suryadinata, Leo. (2003). *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta : Pustaka LPES.
- Syamtidar. (2011). *Inspirasi Perang Waterloo Pasang Surut Napoleon Bonaparte*. Surabaya : Portico Publishing.